



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

AUDITED

STASIUN KIPM PADANG

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang-Pariaman, 07 Mei 2024
Plt. Kepala,



Ivonila Etris, SE
NIP. 19751007 200312 2 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	39
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
F. Pengungkapan Penting Lainnya	62
VI. Lampiran dan Daftar	67





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

JALAN RAYA BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU, PADANG PARIAMAN 25586
TELEPON (0751) 819109, 819090, FAKSIMILE (0751) 819109
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipm.padang@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Padang-Pariaman, 07 Mei 2024
Plt. Kepala,

Ivonila Etris, SE
NIP. 19751007 200212 2 004



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Tahunan **Tahun Anggaran 2023** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp29.610.057,00** atau mencapai **247 persen** dari estimasi pendapatan sebesar **Rp12.000.000,00**. Sementara realisasi pendapatan yang terdapat pada Laporan Operasional adalah sebesar **Rp.28.420.200,00** yang berasal dari pendapatan operasional sebesar **Rp25.220.000,00** dan non operasional sebesar **Rp.3.200.200,00**. Sehingga terdapat selisih antara pendapatan Laporan Realisasi anggaran dengan Laporan Operasional sebesar **Rp.1.189.857,00** yang berasal dari penerimaan Kembali belanja pegawai tahun yang lalu.

Realisasi Belanja Negara untuk periode berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp7.481.600.790,00** atau mencapai **99,66 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp7.506.965.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per **31 Desember 2023**.



Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Per **31 Desember 2023** dicatat dan disajikan sebesar **Rp9.322.772.979,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp281.039.375,00**, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp9.322.772.979,00**, Nilai Kewajiban tersaji sebesar **Rp16.840.750,00** yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek . Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar **Rp9.322.772.979,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp25.220.000,00**. Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp7.790.617.363,00**, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp(7.765.397.363,00)**. Kegiatan non operasional defisit sebesar **Rp(4.834.170,00)** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp(7.767.031.333,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal **01 Januari 2023** adalah sebesar **Rp9.620.939.655,00** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(7.767.031.333,00)** kemudian ditambah dengan koreksi lain - lain TA 2023 senilai



Rp5.949,00 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp7.452.017.958,00 kenaikan/penurunan ekuitas Rp(315.007.426,00) sehingga ekuitas akhir pada Tanggal **31 Desember 2023** adalah senilai Rp9.305.932.229,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Padang-Pariaman, 16 Januari 2024
Plt. Kepala,

Ivonila Etris, SE
NIP. 19751007 200212 2 004



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KIPM PADANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Anggaran	TA 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	12,000,000	29,610,057	246.75	3,491,748
Jumlah Pendapatan		12,000,000	29,610,057	246.75	3,491,748
B. BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4,279,159,000	4,259,519,063	99.54	1,846,367,456
Belanja Barang	B.4	3,043,156,000	3,038,759,727	99.86	1,270,452,500
Belanja Modal	B.5	184,650,000	183,322,000	99.28	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		7,506,965,000	7,481,600,790	99.66	3,116,819,956

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



II. NERACA

STASIUN KIPM PADANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	235,516	1,189,857
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(1,177)	(5,949)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	-	1,183,908
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	-
Persediaan	C.10	280,805,036	161,645,685
Jumlah Aset Lancar		281,039,375	162,829,593
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1,985,290,880	1,985,290,880
Peralatan dan Mesin	C.15	7,084,153,715	7,071,428,715
Gedung dan Bangunan	C.16	6,973,191,307	6,973,191,307
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	223,660,000	223,660,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(7,224,562,298)	(6,780,706,484)
Jumlah Aset Tetap		9,041,733,604	9,472,864,418
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			
		9,322,772,979	9,635,694,011
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	14,754,356
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	16,840,750	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16,840,750	14,754,356
JUMLAH KEWAJIBAN			
		16,840,750	14,754,356
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	9,305,932,229	9,620,939,655
JUMLAH EKUITAS			
		9,305,932,229	9,620,939,655
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		9,322,772,979	9,635,694,011

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM PADANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	25,220,000	9,760,000
JUMLAH PENDAPATAN		25,220,000	9,760,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,259,032,291	4,036,015,248
Beban Persediaan	D.3	145,395,204	72,343,750
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,508,663,350	1,390,593,300
Beban Pemeliharaan	D.5	592,583,727	419,239,500
Beban Perjalanan Dinas	D.6	670,488,800	447,614,900
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	614,452,814	697,572,256
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1,177	5,949
JUMLAH BEBAN		7,790,617,363	7,063,384,903
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,765,397,363)	(7,053,624,903)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	3,200,200	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3,200,200	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4,834,170)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4,834,170	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		(1,633,970)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,767,031,333)	(7,053,624,903)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,767,031,333)	(7,053,624,903)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KIPM PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	9,620,939,655	10,299,045,923
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,767,031,333)	(7,053,624,903)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	5,949	3,884
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		7,452,017,958	6,375,514,751
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(315,007,426)	(678,106,268)
EKUITAS AKHIR	E.5	9,305,932,229	9,620,939,655

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan PERMENKP 48 PERMENKP Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkedudukan di Jalan Raya Bandara Internasional Minangkabau, Padang-Pariaman, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan



dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, dan perubahan organisasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi, dan Terpercaya”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan



perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat



2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang secara optimal.



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun KIPM Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang



mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian



laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun KIPM Padang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Padang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:



- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan



Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - § harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - § harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - § harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);



- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan



penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan



Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas



bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *automatic adjustment* (blokir anggaran) dan Perubahan Halaman III DIPA sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:



Jenis Belanja	JUMLAH ANGGARAN	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	12,000,000	12,000,000
Pendapatan lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	12,000,000	12,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	4,139,159,000	4,279,159,000
Belanja Barang	3,043,156,000	3,043,156,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	184,650,000	184,650,000
Jumlah Belanja	7,366,965,000	7,506,965,000

Realisasi

Pendapatan
Rp29.610.057,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp29.610.057,00 atau mencapai 247 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan Stasiun KIPM Padang merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN Semester I Tahun 2023

Jenis Pendapatan	2023		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	480,000	500,000	104.17
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	11,520,000	24,720,000	214.58
Pendapatan Denda	-	-	-
Penerimaan Kembali TAYL	-	1,189,857	100
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	3,200,200	100
Jumlah	12,000,000	29,610,057	246.75

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara sebesar



Rp19.073.309 atau 64,41 persen. Perbandingan realisasi PNBP Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBP TA. 2023 dan 2022

URAIAN JENIS PNBP	REALISASI PNBP (Rp)		NAIK (TURUN)	
	2023	2022	Jumlah	%
Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN	3,200,200	-	3,200,200	100
Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL	1,189,857	776,748	413,109	34.72
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi	24,720,000	9,520,000	15,200,000	61.49
Pendapatan Denda	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	500,000	240,000	260,000	52.00
Jumlah	29,610,057	10,536,748	19,073,309	64.41

Perbedaan antara realisasi Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional akan dijelaskan pada tabel berikut:

Pendapatan PNBP (LO) harus sama dengan Pendapatan PNBP (LRA) dikurangi Piutang PNBP Awal Tahun ditambah Piutang PNBP Akhir Tahun	Pendapatan PNBP (LO) = Pendapatan PNBP (LRA) - Piutang PNBP Awal Tahun + Piutang PNBP Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PNBP (LO)	: 25,220,000
PENDAPATAN PNBP (LRA)	: 29,610,057
PIUTANG PNBP AKHIR TAHUN (NERACA)	: 0
PIUTANG PNBP AWAL TAHUN (NERACA)	: 0
Selisih	: -4,390,057
penjelasan : Selisih merupakan Pendapatan dari penjualan BMN sebesar Rp3.200.200,00 dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu Rp1.189.857,00	

B.2 Belanja Negara

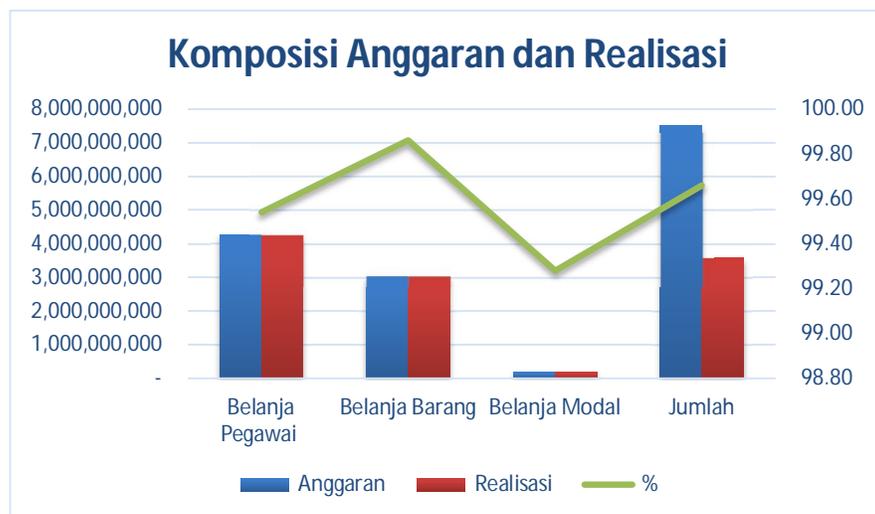
Realisasi Belanja Negara Rp7.481.600.790,00

Realisasi Belanja SKIPM Padang selama tahun 2023 setelah dikurangi pengembalian adalah sebesar Rp7.481.764.678,00 atau 99.86 persen dari anggaran belanja sebesar Rp7.366.965.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4,279,159,000	4,259,519,063	99.54
Belanja Barang	3,043,156,000	3,038,759,727	99.86
Belanja Modal	184,650,000	183,322,000	99.28
Jumlah	7,506,965,000	7,481,600,790	99.66

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp1.082.928.041,00 atau 16.92 persen dibandingkan



realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu tahun anggaran 2023 lebih besar dari pagu tahun anggaran 2022, dikarenakan tahun anggaran 2023 pagu untuk belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan pagu belanja pegawai di tahun 2022.
2. Pagu anggaran 2022 tidak terdapat pagu belanja modal.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	REALISASI NETTO (Rp)		NAIK/ TURUN	
	TA. 2023	TA. 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Pegawai	4,259,519,063	4,036,953,849	222,565,214	5.51
Belanja Barang	3,038,759,727	2,361,718,900	677,040,827	28.67
Belanja Modal	183,322,000	-	183,322,000	100.00
Jumlah	7,481,600,790	6,398,672,749	1,082,928,041	16.92

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp4.259.519.727,
00*

Realisasi Belanja Pegawai selama tahun 2023 adalah sebesar Rp4.259.519.727,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan realisasi belanja Pegawai Tahun 2023 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,143,158,000	2,126,352,569	99.22
Belanja Lembur	272,951,000	272,787,000	99.94
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,863,050,000	1,860,379,709	99.86
Jumlah Belanja	4,279,159,000	4,259,519,278	99.54
Pengembalian Belanja Pegawai	-	215	
Jumlah Belanja	4,279,159,000	4,259,519,063	99.54



Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp222.565.214,00 atau 21,63 persen karena adanya pegawai pindah dan kenaikan kelas jabatan tunjangan kinerja. Perbandingan realisasi belanja pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Semester I TA. 2022

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		NAIK (TURUN)	
	TA. 2023	TA. 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,126,352,354	2,044,720,357	81,631,997	3.99
Belanja Lembur	272,787,000	245,445,000	27,342,000	11.14
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,860,379,709	1,746,788,492	113,591,217	6.50
Jumlah Belanja	4,259,519,063	4,036,953,849	222,565,214	21.63

Pada Laporan Operasional realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp4.259.032.091,00. Apabila dibandingkan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional terdapat selisih sebesar Rp486.972,00. Angka ini berasal dari jurnal akrual gaji yang masih harus dibayarkan Januari 2023 dan pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2023.

Penjelasan Selisih Belanja Pegawai antara LRA dan LO	
Belanja Pegawai (LRA)	: 4,259,519,063
Belanja Pegawai (LO)	: 4,259,032,091
Selisih	: 486,972
penjelasan : Selisih merupakan jumlah dari jurnal akrual belanja gaji yang masih harus dibayar Januari 2023 Rp251.256,00 dan pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2023 Rp235.516,00	

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp3.038.759.727,00

Realisasi Belanja Barang selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.038.156.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Tahun 2023 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	858,565,000	858,104,900	99.95
Belanja Barang Non Operasional	294,852,000	294,586,050	99.91
Belanja Jasa	355,640,000	353,634,750	99.44
Belanja Pemeliharaan	553,033,000	552,672,900	99.93
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	671,576,000	670,488,800	99.84
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	309,490,000	309,436,000	99.98
Jumlah Belanja	3,043,156,000	3,038,923,400	99.86
Pengembalian Belanja Barang	-	163,673	100.00
Jumlah Belanja	3,043,156,000	3,038,759,727	99.86

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp163.673,00, yang merupakan kelebihan pembayaran atas pemeliharaan Gedung dan bangunan, sesuai dengan Hasil Audit Kinerja Itjen Nomor: R.140/ITJ.4/HP.130/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023. Atas kelebihan pembayaran tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara dengan nomor NTPN: 5B8BA395AS9DIMUD tanggal 06 Juni 2023.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp676.840.827,00 atau 28,66 persen karena pagu anggaran Tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding pagu anggaran Tahun 2022. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan



Tahun 2022 disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	2023	2022	Jumlah	%
Belanja Barang Operasional	858,104,900	806,811,600	51,293,300	6.36
Belanja Barang Non Operasional	294,586,050	256,928,900	37,657,150	14.66
Belanja Jasa	353,634,750	326,948,450	26,686,300	8.16
Belanja Pemeliharaan	552,509,227	392,849,500	159,659,727	40.64
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	670,488,800	447,394,900	223,093,900	49.87
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	309,436,000	130,985,550	178,450,450	136.24
Jumlah Belanja	3,038,759,727	2,361,918,900	676,840,827	28.66

Belanja Modal
Rp183.322.000,
00

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp183.322.000,00. Rincian belanja anggaran dan realisasi belanja modal disajikan pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184,650,000	183,322,000	86.26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja	184,650,000	183,322,000	0.00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp183.322.000,00 atau sebesar 100 persen, karena pada TA. 2022 tidak terdapat alokasi belanja modal. Perbandingan belanja modal Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat disajikan pada tabel 10 sebagai



berikut:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	Realisasi Netto (Rp)		Naik/ Turun	
	TA. 2023	TA. 2022	Jumlah	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159,272,000	0	159,272,000	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0.00
Jumlah Belanja	159,272,000	0	159,272,000	(100.00)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal tanah tidak mengalami kenaikan/penurunan.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp183.322.000,00. Rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 disajikan dalam tabel 11 berikut ini:



Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik (Turun)	
	2023	2022	Jumlah	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	-	0
Alat Kantor	48,020,000	0	48,020,000	100
Alat Rumah Tangga	0	0	-	0
Alat Studio	16,778,000	0	16,778,000	100
Alat Komunikasi	0	0	-	0
Peralatan Pemancar	0	0	-	0
Unit Alat Laboratorium	6,845,000	0	6,845,000	100
Alat Laboratorium Fisika/Elektronika	0	0	-	0
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	0	0	-	0
Alat Pengolahan	0	0	-	0
Komputer Unit	85,730,000	0	85,730,000	100
Peralatan Komputer	12,600,000	0	12,600,000	100
Peralatan Proses/Produksi	0	0	-	0
Peralatan Keselamatan Kerja	13,349,000	0	13,349,000	100
Jumlah Belanja Bersih	183,322,000	0	183,322,000	100

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023. Pada Tahun 2022 juga tidak terdapat realisasi belanja modal Gedung dan bangunan. Realisasi Belanja Modal tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, karena tidak adanya pagu anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan. Perbandingan belanja Gedung bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel 12 sebagai berikut:



Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI		Naik/ Turun	
	2023	2022	Jumlah	%
Gedung Tempat Kerja	0	0	0	-
Belanja Modal BLU	0	0	0	-
Tugu/ Tanda Batas	0	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	0	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2023.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar C.1 Aset Lancar

Rp281.039.036,00 Nilai aset lancar per 31 Desember 2023 dan per 2022 adalah masing – masing sebesar Rp281.039.036,00 dan Rp162.829.593,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Piutang bukan pajak	235,516	1,189,857
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,177)	(5,949)
4	Persediaan	280,805,036	161,645,685
5	Persediaan yang belum diregister	-	-
Jumlah		281,039,375	162,829,593

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:



Tabel 14
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

No	Keterangan	31 Desember 2023
1	Uang di Rekening Bank	-
2	Saldo UP (Uang tunai di brankas bendahara)	-
3	Kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan	-
Jumlah		-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh PNBP langsung disetorkan ke kas negara, jadi bendahara tidak menerima uang untuk disetorkan Kembali.

*Kas
Lainnya
dan Setara
Kas Rp0,00*

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang
PNBP
Rp235.516,
00*

C.1.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp235.516,00 dan Rp1.189.857,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBP pada Stasiun KIPM Padang merupakan pengembalian atas potongan tunjangan kinerja



bulan Desember 2023 yang nantinya akan dipotong melalui tunjangan kinerja bulan Januari 2024 yang akan dibayarkan pada bulan Februari 2024.

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00*

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan per 31
Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Bagian
Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan
pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua
belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp0,00*

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31
Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing
adalah sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan
TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Bukan
Pajak
Rp1.177,00*

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31
Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp(1.177,00) dan Rp(5.949,00) Penyisihan Piutang Tak Tertagih
– Piutang Bukan Pajak adalah merupakan penyisihan piutang
atas pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2023
yang dibayarkan dibulan Februari 2024.

Penyisihan piutang tidak tertagih terkait akrual pengembalian
tunjangan kinerja bulan desember 2023 yang akan dipotong
pada penerimaan Tunjangan kinerja Januari 2024.



Belanja **C.1.8 Belanja Dibayar di Muka**

*Dibayar di
Muka
Rp0.00*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.00,- dan Rp0.00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan **C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

*yang Masih
Harus
Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan **C.1.10 Persediaan**

*Rp280.805.0
36,00*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp280.805.036,00 dan Rp161.645.685,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	96,190,701	60,519,570
Barang untuk Pemeliharaan	3,070,300	3,960,500
Suku Cadang	11,195,235	19,177,535
Bahan Baku	170,348,800	77,988,080
Jumlah	280,805,036	161,645,685

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Penjelasan perbedaan penyajian antara LO dan LRA terhadap persediaan adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun	Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun. Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau <i>weighted average</i>
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	: 185,469,704
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	: 309,436,000
PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2023	: 161,645,685
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2023	: 280,805,036
Selisih	: -4,806,945
PENJELASAN : Selisih Rp(4.806.945) dikarenakan adanya beban persediaan rusak/usang Rp.4,834,170,00 dan transfer masuk sertifikat sebesar Rp.27.225,00.	

Tagihan
TP/TGR
Rp0.00

C.1.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.00.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.1.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada



pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Aset Tetap

Rp9.327.394.347,00

C.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing – masing sebesar Rp9.327.394.347,00 dan Rp9.472.864.418,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional entitas.

Tanah

Rp1.985.290.880,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun KIPM Padang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.985.290.880.

Rincian Tanah Tahun 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai BMN	Hasil Penilaian
1	1515 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	413,595,000	1,684,407,000
2	200 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	54,600,000	224,568,000
3	60 m2	Jl. Raya Bandara Internasional Minangkabau	400,000	67,370,000
4	880m2	Kepulauan Mentawai Desa SIKAKAP	8,945,880	8,945,880
Jumlah			477,540,880	1,985,290,880



Peralatan dan Mesin Rp7.084.153.715,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp7.084.153.715,00 dan Rp7.071.428.715,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	7,071,428,715
Mutasi tambah:	
Pembelian	183,322,000
Transfer Masuk	0
Reklas Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Penghentian Penggunaan	170,597,000
Saldo per 31 Desember 2023	7,084,153,715
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(6,938,901,555)
Nilai Buku per 30 Desember 2023	145,252,160

Terdapat mutasi tambah berupa pembelian Peralatan dan Mesin sedangkan mutasi kurang berasal dari penghentian penggunaan BMN yang akan dihapuskan.

Gedung dan Bangunan Rp6.973.191.307

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing - masing senilai Rp6.973.191.307,00 dan Rp6.973.191.307,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	6,973,191,307
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Perolehan melalui KDP	-
Jaringan Listrik Gedung dan Bangunan	-
Revaluasi Gedung dan Bangunan	-
Saldo per 31 Desember 2023	6,973,191,307
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(759,486,895)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6,213,704,412



Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp223.660.000,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp223.660.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	223,660,000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2023	223,660,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(83,330,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	140,330,000

Rincian asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp0,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



Akumulasi C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap

Rp6.938.90

1.555,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(6.938.901.555,00) dan Rp(6.780.708.484,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7,084,153,715	(6,096,084,660)	988,069,055
2	Gedung dan Bangunan	6,973,191,307	(759,486,895)	6,213,704,412
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	223,660,000	(83,330,000)	140,330,000
4	Aset Tetap yang tidak digunakan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		14,281,005,022	(6,938,901,555)	7,342,103,467

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp0,00

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:



*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
Rp0,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0.00 dan Rp0.00,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga
Rp16.840.7
50,00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp16.840.750,00 dan Rp14.754.356,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Uraian dari Utang kepada pihak ketiga ini adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah
Listrik Kantor	11,727,850
Listrik kargo	411,650
Telepon	79,000
Telepon	43,650
Telepon	91,300
Telepon	224,500
PDAM	1,520,300
TV Langganan	233,900
Internet	2,508,600
Total	16,840,750

Pendapatan C.26 Pendapatan Diterima di Muka

*Diterima di
Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Ekuitas C.27 Ekuitas

*Rp9.591.60
2.972,00*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.591.602.972,00 dan Rp9.620.939.655,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp7.479.726.620,00)

D.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp(7.479.726.620,00) dan Rp(7.053.624.903,00). Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp25.220.000,00 dikurangi beban Rp7.504.946.620,00.

Pendapatan PNBPNP Rp. 25.220.000,00

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.220.000,00 dan Rp9.760.000.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina	500,000	240,000	108.33
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	24,720,000	9,520,000	159.66
Jumlah	25,220,000	9,760,000	158.40

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi, pendapatan jasa karantina ikan.

Perbedaan antara realisasi Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional akan dijelaskan sebagai berikut:



Pendapatan PNB (LO) harus sama dengan Pendapatan PNB (LRA) dikurangi Piutang PNB Awal Tahun ditambah Piutang PNB Akhir Tahun	Pendapatan PNB (LO) = Pendapatan PNB (LRA) - Piutang PNB Awal Tahun + Piutang PNB Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PNB (LO)	: 25,220,000
PENDAPATAN PNB (LRA)	: 29,610,057
PIUTANG PNB AKHIR TAHUN (NERACA)	: 0
PIUTANG PNB AWAL TAHUN (NERACA)	: 0
Selisih	: -4,390,057
penjelasan : Selisih merupakan Pendapatan dari penjualan BMN sebesar Rp3.200.200,00 dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu Rp1.189.857,00	

*Beban
Pegawai
Rp.4.259.032.
291,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.259.032.291,00 dan Rp4.036.015.248,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturasn perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji tunjangan PNS	2,126,101,098	2,047,240,980	3.85
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,860,144,193	1,746,788,492	6.49
Beban Lembur	272,787,000	245,445,000	11.14
Jumlah	4,259,032,291	4,039,474,472	5.44



Pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Selisih Belanja Pegawai antara LRA dan LO		
Belanja Pegawai (LRA)	:	4,259,519,063
Belanja Pegawai (LO)	:	4,259,032,091
Selisih	:	486,972
penjelasan : Selisih merupakan jumlah dari jurnal akrual belanja gaji yang masih harus dibayar Januari 2023 Rp251.256,00 dan pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2023 Rp235.516,00		

Beban

Persediaan

Rp145.395.20

4,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp145.395.204,00 dan Rp72.343.750,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	82,491,924	67,006,250	23.11
Beban Persediaan Bahan Baku	62,903,280	5,337,500	1,078.52
Jumlah	145,395,204	72,343,750	100.98

Penjelasan perbedaan penyajian antara LO dan LRA terhadap persediaan adalah sebagai berikut:



Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun	Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun. Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau <i>weighted average</i>
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	: 185,469,704
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	: 309,436,000
PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2023	: 161,645,685
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2023	: 280,805,036
Selisih	: -4,806,945
PENJELASAN : Selisih Rp(4.806.945) dikarenakan adanya beban persediaan rusak/usang Rp.4.834,170,00 dan transfer masuk sertifikat sebesar Rp.27.225,00.	

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp1.508.653.
350,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.508.653.350,00 dan Rp1.390.593.300,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Tahun 2023 dan Tahun
2022

Uraian	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	142,256,400	124,483,425	14.28
Beban Langganan Telepon	4,595,350	4,254,625	8.01
Beban Langganan Air	16,822,100	15,970,800	5.33
Beban Sewa	42,500,000	50,450,000	(15.76)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,388,650	41,504,850	(79.79)
Beban Jasa Konsultan	0	0	0.00
Beban Jasa Profesi	22,800,000	6,900,000	100.00
Beban Jasa lainnya	118,599,900	80,670,500	47.02
Beban Bahan	260,654,450	194,538,900	33.99
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	25,771,600	54,230,000	(52.48)
Beban Keperluan Perkantoran	550,121,750	495,488,450	11.03
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	123,551,500	57,024,000	116.67
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	2,040,000	4,024,300	(49.31)
Beban Honor Operasional Satker	103,680,000	125,538,000	(17.41)
Beban Barang Operasional Lainnya	78,711,650	69,801,450	12.77
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Barang Operasional - Penanganan Covid	0	57,024,000	0.00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	530,000	0.00
Jumlah	1,508,653,350	1,390,593,300	8.49



*Beban
Pemeliharaan
Rp592.583.727,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp592.583.727,00 dan Rp419.239.500,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,239,327	160,914,000	18.22
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	362,269,900	231,935,500	56.19
Beban persediaan untuk pemeliharaan	24,847,200	24,206,500	2.65
Beban persediaan suku cadang	15,227,300	2,183,500	597.38
Jumlah	592,583,727	419,239,500	41.35

Pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional terdapat selisih. Pengungkapan selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Penjelasan Selisih Belanja Pemeliharaan antara LRA dan LO	
Belanja Pemeliharaan (LRA)	: 552,509,227
Belanja Pemeliharaan (LO)	: 592,583,727
Selisih	: -40,074,500
penjelasan : Selisih merupakan jumlah dari Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp24.847.200,00 dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp15.227.300,00	



*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp670.488.80
0,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp670.488.800,00 dan Rp447.614.900,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan perjalanan dinas ini disebabkan oleh blokir anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	430,204,600	251,402,500	71.12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	11,200,000	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	13,000,000	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	240,284,200	172,012,400	39.69
Jumlah	670,488,800	447,614,900	49.79

*Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun KIPM Padang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.



*Beban
Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp328.792.071,00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp328.792.071,00 dan Rp697.572.256,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA. 2023	TA. 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	470,657,247	553,776,689
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137,923,567	137,923,567
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5,872,000	5,872,000
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-
Jumlah Penyusutan	614,452,814	697,572,256
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	614,452,814	697,572,256



Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp1.177,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.177,00 dan Rp5.949,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,177	5,949	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	1,177	5,949	0.00

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(1.633.970,
00)

D.2 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2023 adalah sebesar Rp(1.633.970,00). Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	3,200,200	0	0.00
Beban Pelepasan aset non lancar	0		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lancar	3,200,200	0	0.00
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0		
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	4,834,170	0	0.00
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(4,834,170)	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(1,633,970)	0	0.0

*)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar**D.13 Pos Luar Biasa****Biasa Rp0,00**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Ekuitas Awal****E.1 Ekuitas Awal****Rp9.620.939.655,00**

Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.620.939.655,00 dan Rp Rp10.299.045.923,00.

Defisit LO**E.2 Surplus (Defisit) LO****Rp(7.767.031.333,00)**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(7.767.031.333,00) dan Rp(7.053.624.903,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.



Penyesuaian **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Atas **E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Reklasifikasi

Rp0.00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Selisih **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Revaluasi

Aset Tetap

Rp0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Tetap Non

Revaluasi

Rp0,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.



Koreksi Lain-Lain
Rp5.949,00

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.949,00 dan Rp3.884,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp7.452.017.958,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.452.017.958,00 dan Rp6.378.514.751,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(29,610,057)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,481,600,790
Transfer Masuk	27,225
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	7,452,017,958

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023, DDEL sebesar



Rp(29.610.057,00) ini merupakan jumlah pendapatan selama tahun 2023. sedangkan DKEL sebesar Rp7.481.600.790,00 yang merupakan jumlah realisasi SP2D selama tahun 2023.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp27.225,00 terdiri dari transfer masuk dari Stasiun KIPM Pekanbaru berupa sertifikat mutu dengan nomor BAST nomor: B.1233/SKIPM.PKU/KI.310/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir
Rp9.591.602.
972,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.305.932.229,00 dan Rp9.620.939.655,00.



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Informasi Rekening Satker

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023
1	9890455674321000	BPg 010 SKIPM PADANG	0

- Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Padang SK.01/13.0-KPA/KU-100/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Keuangan Tahun 2022 Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Stasiun KIPM Padang, Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Abdur Rohman, S.St. Pi, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Abdur Rohman, S.St. Pi, M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Ivonila Etris, SE	Pejabat Penandatanganan SPM
4	Aji Cipto Suroso	Bendahara Pengeluaran
5	Octa Venianta Ginting, A.Md	Bendahara Penerimaan

- Pada tanggal 15 Februari 2023 Stasiun KIPM Padang melakukan revisi yang pertama dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567432/2023 Revisi Pertama. Alasan dilakukan



revisi adalah pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan I.

- Pada tanggal 14 April 2023 Stasiun KIPM Padang melakukan revisi yang kedua dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567432/2023 Alasan dilakukan revisi adalah pemutakhiran halaman III DIPA Triwulan II.
- Pada tanggal 02 Juli 2023 Stasiun KIPM Padang melakukan revisi yang ketiga dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567432/2021 Revisi Ketiga. Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Halaman III DIPA Triwulan III.
- Pada tanggal 10 Juli 2023 Stasiun KIPM Padang melakukan revisi yang keempat dengan nomor revisi: DIPA-032.13.2.567432/2022 Revisi Keempat. Alasan dilakukan revisi adalah pegerseran KRO.

No	Akun	Semula	Menjadi
1	3989.ABR	65,000,000	100,000,000
2	3990.QDC	170,000,000	135,000,000
Total		235,000,000	235,000,000

- Pada tanggal 19 Oktober 2023 Stasiun KIPM padang melalukan revisi kelima. Alasan dilakukannya revisi adalah dalam rangka penambahan pagu belanja pegawai.

No	Uraian	Semula	Menjadi
1	Gaji dan Tunjangan	4,139,159,000	4,279,159,000
Total		4,139,159,000	4,279,159,000

- Pada tanggal 20 November 2023 Stasiun KIPM Padang melakukan revisi keenam. Alasan dilakukannya revisi adalah pemutakhiran data POK.
- Hasil audit kinerja tahun 2022 - 2023 nomor R.140/ITJ.4/HP.130/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 sudah ditindaklanjuti dan sudah tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jendral Nomor: 2537.03.10/ITJ/PL.420/X/2023



tanggal 03 Oktober 2023.

- Pada tanggal 06 April 2023 dilaksanakan kegiatan Bulan Mutu Karantina dengan Pagu Anggaran Rp135.000.000,00 realisasi Rp134.510.900,00 atau sebesar 99,64 persen. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan berupa penyediaan Ikan Sehat Bermutu dalam rangka Bulan Mutu Karantina sebanyak 700 paket. Pembagian ikan sehat ini disebar ke beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kota Padang : 200 Paket
 2. Kota Solok : 50 Paket
 3. Kota Sawahlunto : 45 Paket
 4. Kota Padang Panjang : 45 Paket
 5. Kabupaten Solok Selatan : 60 Paket
 6. Kabupaten Sijunjung : 60 Paket
 7. Kabupaten Tanah Datar : 60 Paket
 8. Kabupaten Solok : 60 Paket
 9. Kabupaten Dharmasraya : 60 Paket
 10. Kabupaten Pesisir Selatan : 60 Paket
- Terdapat 12 output kegiatan Prioritas pada Stasiun KIPM Padang dengan Pagu Anggaran Prioritas Nasional (PN) adalah sebesar Rp. 757.799.000,00 dan realisasi sebesar Rp756.881.800,00, dengan rincian sebagai berikut: (dalam ribuan)



Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Stasiun KIPM Padang	Sarana pengawasan karantina	61,000	60,942	99.9	Unit	10	10	100
	Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu	135,000	134,510	99.6	Orang	110	110	100
	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	46,000	45,762	99.5	Lembaga	1	1	100
	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	36,000	35,983	100	Laporan	2	2	100
	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	250,227	250,146	100	produk	1,390	1,390	100
	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	29,000	29,000	100	Lembaga	6	6	100
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	50,000	49,992	100	Lembaga	3	3	100
	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	40,000	39,975	99.9	Produk	1	1	100
	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	61,500	61,496	100	Rekomen dasi Kebijakan	1	1	100
	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	12,000	12,000	100	produk	2	2	100
	Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	20,000	20,000	100	Lembaga	1	1	100
	Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaaan ikan yang di selesaikan	17,072	17,071	100	Perkara	3	3	100
	Jumlah							

- Terdapat 1 output kegiatan Program tematik APBN di Stasiun KIPM Padang adalah anggaran Responsif Gender



dengan pagu anggaran Rp60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100%. Berikut pengungkapan kegiatan tematik APBN:

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Stasiun KIPM Padang	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	61,000	60,000	100	Lembaga	1	1	100
Jumlah								1

Padang Pariaman, 07 Mei 2024
Plt. Kepala



Ivonila Etris, SE
NIP. 19751007 200312 2 004



Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Stasiun KIPM Padang
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No	Uraian	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A	Tanah				
1	Tanah	2.615	1,985,290,880	-	1,985,290,880
	Jumlah		1,985,290,880	-	1,985,290,880
B	Peralatan dan Mesin				
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	19	1,120,988,279	932,847,620	188,140,659
2	Alat Ukur	1	14,975,000	14,975,000	-
3	Alat Pengolahan	6	50,473,000	50,473,000	-
4	Alat Kantor	88	438,004,900	383,339,700	54,665,200
5	Alat Rumah Tangga	258	1,124,785,550	970,067,200	154,718,350
6	Alat Studio	32	234,645,607	207,860,407	26,785,200
7	Alat Komunikasi	4	32,460,000	32,460,000	-
8	Peralatan Pemancar	5	296,853,770	235,525,639	61,328,131
9	Alat Kedokteran	6	742,474,500	742,474,500	-
10	Unit Alat Laboratorium	71	2,314,052,289	2,141,267,350	172,784,939
11	Unit Alat Laboratorium kimia nuklir	-	-	-	-
12	Alat Laboratorium fisika nuklir	1	86,240,000	74,741,334	11,498,666
13	Komputer Unit	37	459,550,980	377,944,355	81,606,625
14	Peralatan Komputer	33	161,649,840	141,818,965	19,830,875
15	Alat Kerja Penerbangan	-	-	-	-
16	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	7,000,000	3,937,500	3,062,500
	Jumlah	562	7,084,153,715	6,309,732,570	774,421,145
C	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4	6,764,441,307	804,588,678	5,959,852,629
2	Tugu/ Tanda batas	2	208,750,000	23,860,000	184,890,000
	Jumlah		6,973,191,307	828,448,678	6,144,742,629
D	Jaringan				
1	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1	33,660,000	17,391,000	16,269,000
2	Jaringan Listrik	1	190,000,000	66,875,000	123,125,000
	Jumlah		223,660,000	84,266,000	139,394,000
	Total		16,266,295,902	7,222,447,248	9,043,848,654



Lampiran

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:33 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,220,000	9,760,000	15,460,000	158.402
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,220,000	9,760,000	15,460,000	158.402
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,220,000	9,760,000	15,460,000	158.402
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,259,032,291	4,036,015,248	223,017,043	5.526
Beban Persediaan	145,395,204	72,343,750	73,051,454	100.978
Beban Barang dan Jasa	1,508,663,350	1,390,593,300	118,070,050	8.491
Beban Pemeliharaan	592,583,727	419,239,500	173,344,227	41.347
Beban Perjalanan Dinas	670,488,800	447,614,900	222,873,900	49.791
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:33 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	614,452,814	697,572,256	(83,119,442)	(11.916)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,177	5,949	(4,772)	(80.215)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,790,617,363	7,063,384,903	727,232,460	10.296
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,765,397,363)	(7,053,624,903)	(711,772,460)	10.091
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	3,200,200	0	3,200,200	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,200,200	0	3,200,200	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4,834,170)	0	(4,834,170)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,834,170	0	4,834,170	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(1,633,970)	0	(1,633,970)	()
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,767,031,333)	(7,053,624,903)	(713,406,430)	10.114
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,767,031,333)	(7,053,624,903)	(713,406,430)	10.114

Keterangan :

FINAL

Padang Pariaman, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



IVONILA ETRIS

197510072003122004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:33 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	9,620,939,655	10,299,045,923	(678,106,268)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,767,031,333)	(7,053,624,903)	(713,406,430)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	5,949	3,884	2,065	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	5,949	3,884	2,065	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,452,017,958	6,375,514,751	1,076,503,207	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(315,007,426)	(678,106,268)	363,098,842	-
EKUITAS AKHIR	9,305,932,229	9,620,939,655	(315,007,426)	-

Keterangan :

FINAL

Padang Pariaman, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



IVONILA ETRIS

197510072003122004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	235,516	1,189,857	(954,341)	(80.21)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,177)	(5,949)	4,772	(80.22)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	234,339	1,183,908	(949,569)	(80.21)
Persediaan	280,805,036	161,645,685	119,159,351	73.72
JUMLAH ASET LANCAR	281,039,375	162,829,593	118,209,782	72.60
ASET TETAP				
Tanah	1,985,290,880	1,985,290,880	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,084,153,715	7,071,428,715	12,725,000	0.18
Gedung dan Bangunan	6,973,191,307	6,973,191,307	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	223,660,000	223,660,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,224,562,298)	(6,780,706,484)	(443,855,814)	6.55
JUMLAH ASET TETAP	9,041,733,604	9,472,864,418	(431,130,814)	(4.55)
JUMLAH ASET	9,322,772,979	9,635,694,011	(312,921,032)	(3.25)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	16,840,750	14,754,356	2,086,394	14.14
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16,840,750	14,754,356	2,086,394	14.14
JUMLAH KEWAJIBAN	16,840,750	14,754,356	2,086,394	14.14
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	9,305,932,229	9,620,939,655	(315,007,426)	(3.27)
JUMLAH EKUITAS	9,305,932,229	9,620,939,655	(315,007,426)	(3.27)
JUMLAH EKUITAS	9,305,932,229	9,620,939,655	(315,007,426)	(3.27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,322,772,979	9,635,694,011	(312,921,032)	(3.25)

Keterangan :

FINAL



Padang Pariaman, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

IVONILA ETRIS

197510072003122004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:34 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	7,481,600,790
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	29,610,057	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,200,200
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	24,720,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,189,857
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,493,058,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,727	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	118,710,960	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	37,582,772	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	111,825,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	777,450	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	98,708,460	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	237,598,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,430,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	272,787,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,860,379,709	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	550,121,750	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	123,551,500	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,040,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	103,680,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	78,711,650	0
3.0	521211	Belanja Bahan	260,654,450	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25,771,600	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	99,072,000	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	210,364,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	140,391,100	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,582,700	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	16,372,400	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,388,650	0
3.0	522141	Belanja Sewa	42,500,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	22,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	118,599,900	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,403,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	362,269,900	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	430,204,600	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:34 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	240,284,200	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183,322,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	215
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	163,673
JUMLAH			7,511,374,735	7,511,374,735

Keterangan :

FINAL

Padang Pariaman, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



IVONILA ETRIS

197510072003122004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 567432
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SUMATERA BARAT
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 3:34 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 2:25 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,507,005,000	1,493,315,000	1,493,058,200	0	1,493,058,200	99.98	256,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	23,000	21,727	215	21,512	94.47	1,488
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	142,701,000	118,712,000	118,710,960	0	118,710,960	100	1,040
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,057,000	37,585,000	37,582,772	0	37,582,772	99.99	2,228
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	22,680,000	17,640,000	17,640,000	0	17,640,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	102,210,000	111,825,000	111,825,000	0	111,825,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	728,000	778,000	777,450	0	777,450	99.93	550
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	87,874,000	98,850,000	98,708,460	0	98,708,460	99.86	141,540
511129	Belanja Uang Makan PNS	250,000,000	254,000,000	237,598,000	0	237,598,000	93.54	16,402,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,510,000	10,430,000	10,430,000	0	10,430,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,167,788,000	2,143,158,000	2,126,352,569	215	2,126,352,354	99.22	16,805,646
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	245,464,000	272,951,000	272,787,000	0	272,787,000	99.94	164,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	245,464,000	272,951,000	272,787,000	0	272,787,000	99.94	164,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,725,907,000	1,863,050,000	1,860,379,709	0	1,860,379,709	99.86	2,670,291
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,725,907,000	1,863,050,000	1,860,379,709	0	1,860,379,709	99.86	2,670,291
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,139,159,000	4,279,159,000	4,259,519,278	215	4,259,519,063	99.54	19,639,937
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	600,540,000	550,408,000	550,121,750	0	550,121,750	99.95	286,250
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	114,048,000	123,552,000	123,551,500	0	123,551,500	100	500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	103,752,000	103,752,000	103,680,000	0	103,680,000	99.93	72,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	80,348,000	78,813,000	78,711,650	0	78,711,650	99.87	101,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	904,688,000	858,565,000	858,104,900	0	858,104,900	99.95	460,100
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	297,605,000	260,720,000	260,654,450	0	260,654,450	99.97	65,550
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	8,160,000	0	8,160,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	35,272,000	25,972,000	25,771,600	0	25,771,600	99.23	200,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	341,037,000	294,852,000	294,586,050	0	294,586,050	99.91	265,950
5218	Belanja Barang Persediaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 567432
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SUMATERA BARAT
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 07/05/24 3:34 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 7/5/24 2:25 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	103,020,000	99,120,000	99,072,000	0	99,072,000	99.95	48,000
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	210,420,000	210,370,000	210,364,000	0	210,364,000	100	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	313,440,000	309,490,000	309,436,000	0	309,436,000	99.98	54,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	156,000,000	140,400,000	140,391,100	0	140,391,100	99.99	8,900
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	4,740,000	4,582,700	0	4,582,700	96.68	157,300
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	18,000,000	16,372,400	0	16,372,400	90.96	1,627,600
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,400,000	8,400,000	8,388,650	0	8,388,650	99.86	11,350
522141	Belanja Sewa	55,000,000	42,500,000	42,500,000	0	42,500,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	12,300,000	22,800,000	22,800,000	0	22,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	110,900,000	118,800,000	118,599,900	0	118,599,900	99.83	200,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	369,000,000	355,640,000	353,634,750	0	353,634,750	99.44	2,005,250
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,756,000	190,756,000	190,403,000	163,673	190,239,327	99.81	516,673
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291,594,000	362,277,000	362,269,900	0	362,269,900	100	7,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	482,350,000	553,033,000	552,672,900	163,673	552,509,227	99.93	523,773
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	390,227,000	431,108,000	430,204,600	0	430,204,600	99.79	903,400
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	242,414,000	240,468,000	240,284,200	0	240,284,200	99.92	183,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	632,641,000	671,576,000	670,488,800	0	670,488,800	99.84	1,087,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,043,156,000	3,043,156,000	3,038,923,400	163,673	3,038,759,727	99.86	4,396,273
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184,650,000	184,650,000	183,322,000	0	183,322,000	99.28	1,328,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	184,650,000	184,650,000	183,322,000	0	183,322,000	99.28	1,328,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	184,650,000	184,650,000	183,322,000	0	183,322,000	99.28	1,328,000
	JUMLAH BELANJA	7,366,965,000	7,506,965,000	7,481,764,678	163,888	7,481,600,790	99.66	25,364,210

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	235,516	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,177
0.0	117111	Barang Konsumsi	96,190,701	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,070,300	0
0.0	117114	Suku Cadang	11,195,235	0
0.0	117131	Bahan Baku	170,348,800	0
0.0	131111	Tanah	1,985,290,880	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,084,153,715	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,973,191,307	0
0.0	134113	Jaringan	223,660,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,309,847,620
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	828,448,678
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	86,266,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	16,840,750
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,481,600,790
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	29,610,057	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	27,225
0.0	391111	Ekuitas	0	9,620,939,655
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	5,949
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,200,200
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	24,720,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	500,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,492,837,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,512	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	118,688,920	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	37,573,956	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	111,825,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	777,450	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	98,708,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	237,598,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,430,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	272,787,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,860,144,193	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	550,121,750	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	123,551,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,040,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	103,680,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (567432) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 3:33 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	78,711,650	0
3.0	521211	Beban Bahan	260,654,450	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	25,771,600	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	142,182,400	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,679,350	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	16,822,100	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8,388,650	0
3.0	522141	Beban Sewa	42,500,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	22,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	118,599,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,239,327	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	362,269,900	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	430,204,600	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	240,284,200	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	470,657,247	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137,923,567	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,872,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	82,491,924	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	24,847,200	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	15,227,300	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	62,903,280	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	1,177	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	4,834,170	0
JUMLAH			24,372,398,044	24,372,398,044

Keterangan :

FINAL

Padang Pariaman, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



IVONILA ETRIS

197510072003122004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG 567432

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/24 3:33 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,506,965,000	7,481,600,790	(25,364,210)	100	6,413,241,000	6,398,672,749	(14,568,251)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Padang Pariaman, 7 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

IVONILA ETRIS
197510072003122004



STASIUN KIPM PADANG